



KH Abdul Aziz Asyhuri  
 Pengasuh Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islami  
 Kapuan Sawangan Magelang Jawa Tengah

## Dahulukan Kepentingan Umat

*Dewasa ini persoalan tanah merupakan hal krusial. Sebab tanah atau lahan di bumi tidak mungkin bertambah, sementara penduduk bumi yang ingin berdiam di atasnya semakin bertambah. Sebetulnya pentingnya tanah untuk kemaslahatan umat ini untuk apa?*

Menurut saya, dalam masalah tanah ini, Allah berfirman bahwa tanah untuk dimanfaatkan manusia. Pemanfaatan itu harus semaksimal mungkin agar berguna dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan manusianya, dengan harapan penuh berkah dan bertambah-tambah dengan kebaikan-kebaikan. Namun demikian, saya yakin bahwa Allah tidak akan mungkin menyediakan tanah yang kurang untuk ditempati ciptaan-Nya, baik

manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Allah menambah ciptaan-Nya, tentu akan 'memikirkan' bagaimana manusia itu akan bertempat. Dulu, kita memandang tanah tidak sekadar tanah daratan. Sehingga kalau kita masuk ke rumah para sesepuh atau orang-orang kuno, banyak terpampang gambar atau lukisan yang hampir semua lukisan itu menggambarkan gunung, sawah, dan hamparan padi yang menguning.

Jadi memandang tanah hanya yang ada di daratan berarti menciutkan makna tanah. Kesannya, yang dimaksud tanah hanyalah sawah. Padahal tanah lebih dari itu, mencakup tegalan, sungai, laut, dan gunung, yang itu semua disediakan oleh Allah untuk manusia. Tinggal sejauh

mana kita bisa memanfaatkan.

Bahwa kepentingan tanah untuk umat, kami juga memaklumi tanahnya tidak bertambah, tapi penduduknya makin banyak. Bukan hanya manusia, binatang juga bertambah. Namun demikian, Allah tidak akan menciptakan suatu hal yang tidak ada tempatnya. Sehingga nantinya akan muncul kreasi-kreasi bagaimana pemanfaatan tanah itu. Jika ada proyek yang memungkinkan untuk memanfaatkan tanah dengan alasan kepentingan umum, maka perlu kita kaji secara mendalam. Kita tidak bisa meniru orang Barat untuk program KB misalnya. Itu hanya ketakutan saja. Padahal Allah menegaskan akan tetap menyediakan tempat dan makanannya bagi siapa saja yang mau berusaha. Dalam hal ini, kita tidak perlu berkecil hati atau khawatir dengan perkembangan makhluk, kita akan kehabisan tempat tinggal. Asal kita mau beriman kepada Allah, maka akan dicukupi kebutuhan kita.

*Bagaimana dengan dalih pemerintah yang menyerobot tanah warga demi kepentingan umum?*

Bagi saya, kegiatan pemerintah itu proyek, bukan program. Jadi kata kuncinya adalah proyek, bukan kepentingan umum. Dengan logika proyek, tentu tidak akan berpikir tentang manfaat tanah. Yang terpikir proyek itu berjalan dan dana bisa cair. Logika semacam inilah yang sering menimbulkan gejala di kalangan rakyat.

Jika ada istilah 'untuk kepentingan umum', ini hanya alat agar rakyat tidak

berkutik. Menurut saya, oleh karena tanah disediakan oleh Allah untuk makhluk, maka semestinya tidak perlu ada pihak-pihak dengan alasan apa pun yang berebut proyek lalu menggusur tanah sesama manusia.

Oleh karena itu, nenek moyang kita, menganggap bahwa tanah itu *sedumuk bathuk senyari bumi*. Sekecil apapun arealnya harus dipertahankan untuk kepentingan hidup. Jadi jangan semauanya sendiri. Bahkan, hanya untuk mempertahankan sejengkal tanah, kerap orang memperjuangkannya hingga titik darah penghabisan. Jika demi mempertahankan harta dan hak-haknya ia mati, maka ia mati syahid. Harapan kita, pihak-pihak yang punya program lalu jadi proyek harus berpikir panjang untuk kemaslahatan umat, agar tidak merugikan salah satu pihak.

*Apa saja pengalaman Bapak dalam melakukan advokasi pertanian?*

Ada beberapa kali saya melakukan advokasi tanah. Misalnya advokasi tanah proyek perluasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) pada tahun 1986. Tanah yang harus dibebaskan saat Soeharto masih berkuasa itu untuk perluasan TWCB kurang lebih 75 ha. Hasilnya, sebagian desa bisa selamat dari penggusuran untuk TWCB, antara lain Desa Candirejo, Wanurejo, dan Tuksongo yang ada di sekitar Borobudur. Nyatanya sekarang desa Candirejo bisa berubah menjadi desa wisata di mana bisa mendukung keberadaan TWCB meskipun tanahnya tidak dibeli TWCB.

Ada juga advokasi tanah di Ketep Sawangan Magelang untuk proyek pembangunan Ketep Pass Gardu Pandang tahun 1999. Selain itu, advokasi tanah di Tempuran untuk proyek areal industri yang dilaksanakan mulai tahun 1970. Saya ikut advokasi di sini pada tahun 1987-1988 ketika akan diperluas lagi untuk industri karoseri mobil, pengerajian kayu, dan pabrik tekstil. Di samping juga advokasi tanah di Mertoyudan Magelang untuk proyek pembangunan pelebaran jalan negara Keprekan-Mertoyudan sepanjang 15 km harus menggusur tanah di pinggirnya seluas total 15 ha. pada tahun 2005-2006.

*Apa kunci dan tips Bapak dalam melakukan advokasi tanah?*

Kunci saya dalam upaya advokasi tanah adalah dengan membujuk rakyat agar tidak mudah melepaskan tanahnya untuk dibeli. Di sisi lain, bagaimana membujuk pelaksana proyek agar bisa dengan cara kontrak agar rakyat tetap mempunyai hak milik. Mengapa konsep ini saya kedepankan, karena bila orang sudah menerima uang, maka hilanglah akalunya. Apa-apa yang tidak seharusnya dibeli, dibeli. Tiba-tiba akal manusia yang punya uang berbalik 180 derajat. Bahkan pemikiran konsumtif tiba-tiba muncul lebih mewarnai daripada yang produktif. Jarang orang berpikir untuk dibelikan tanah lagi di lokasi lain.

*Kembali pada kasus advokasi tanah, problem apa saja yang banyak muncul dan*

*dihadapi Bapak dalam advokasi tanah di Borobudur?*

Ada beberapa problem yang saya hadapi. Misalnya, problem itu muncul dari pihak-pihak yang mengatasnamakan pelaksana proyek atau *broker* tanah. Mereka mengejar agar mendapatkan tanah untuk dibeli. Termasuk di Tempuran untuk zona industri. Dengan dalih untuk perusahaan-perusahaan dan garasi mobil. Persoalannya, begitu tanah dibeli, maka lepaslah urusannya. Padahal broker ini tidak mau tahu urusan tanah siapa yang dibeli. Begitu bisa dibeli, maka dia tidak akan tahu urusan pemilik tanah sebelumnya. Demikian juga siapa pembelinya atau pengusahanya, juga tidak mau tahu apakah nanti usahanya berkembang atau tidak. Mereka tidak ada urusan. Mereka juga tidak mau tahu tentang nasib pemilik tanah. Dulu, setiap saya melakukan pendekatan, saya selalu menawarkan sistem kontrak atau bekerja sama. Bahkan pejabat militer pun saya dekati. Tapi rakyat juga didekati oleh tentara. Memang terus terang, yang paling berperan adalah orang 'berbaju hijau'.

*Waktu itu bagaimana sikap rakyat?*

Begini, waktu itu situasi dan kondisi semua rakyat dan pemilik tanah jika mendengar kata proyek untuk kepentingan umum, maka rakyat tidak berdaya. Mereka takut dan takut. Ini karena yang menjadi bempemnya yang berbaju hijau, yang semua angkatan bersatu. Kalau ada nada menentang, maka dipanggil di Koramil atau Kodim. ❖